

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas pada sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Hal ini sangat berbanding lurus dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi di negara berkembang, khususnya Indonesia. Terjadinya krisis ini disebabkan oleh pengelolaan yang buruk (*bad governance*) dan birokrasi yang buruk juga.

Beberapa aspek yang mendukung terciptanya *good governance*, adalah pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan (Mardiasmo, 2010). Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak eksekutif untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan yang sudah ditetapkan dilaksanakan sesuai aturan sehingga tujuan dapat tercapai. Pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen untuk memeriksa hasil kinerja pemerintah apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di negara ini menjadi kasus yang menjadi perhatian oleh masyarakat.

Wujud dari KKN tersebut yaitu penyelewengan wewenang, pungutan liar, uang pelicin, uang suap atau uang tutup mulut, sampai menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi yang banyak dilakukan oleh kebanyakan pejabat.

Masyarakat menuntut penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari kasus korupsi, kolusi dan nepotisme dengan sistem pengawasan internal yang lebih baik dan lebih ketat. Pengawasan tersebut juga dilakukan pada pengelolaan keuangan negara agar tidak memberikan kesempatan para pejabat untuk menyelewengkan uang tersebut. Adanya pengawasan yang baik diharapkan dapat menjamin kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* pemerintah harus melakukan perubahan pada seluruh sektor pemerintahan khususnya bidang pengelolaan keuangan daerah. Banyak gangguan pribadi (goyahnya independen seorang auditor, profesional yang diragukan, pengalaman kurang dan kompetensi yang belum maksimal) dan juga gangguan eksternal (kepentingan golongan, tekanan luar dan budaya kerja) yang mempengaruhi sistem tata kelola di instansi pemerintahan. Perubahan yang harus dilakukan yaitu adanya audit internal maupun eksternal terhadap seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan maksimal, sehingga kesalahan dan tindak pidana yang dapat merugikan negara bisa berkurang.

Adanya perubahan yang baik dalam bidang pengawasan maka kualitas hasil pemeriksaan juga meningkat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Auditor akan memberikan keyakinan positif yang dibuat manajemen

dalam laporan keuangan apabila menunjukkan tingkat keyakinan kepastian bahwa laporannya adalah benar. Tingkat keyakinan yang mampu dicapai auditor akan ditentukan oleh hasil bukti yang dikumpulkan. Semakin banyak jumlah bukti yang relevan dan kompeten, semakin tinggi pula keyakinan yang dicapai oleh auditor.

Basuki dkk (2009:200) menyatakan bahwa Kualitas Audit merupakan suatu *issue* yang sangat kompleks. Dinyatakan kompleks dikarenakan banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi Kualitas Audit, yang tergantung pada sudut pandang masing-masing pihak. Adanya perbedaan pengukuran dari Kualitas Audit tersebut yang menyebabkan sulitnya penetapan Kualitas Audit, sehingga akan menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku individual yang melakukan audit. Secara teoritis Kualitas Audit dihubungkan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten dengan biaya yang rendah disertai dengan mempertahankan sikap independensinya.

Nataline & Robby (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara Pengalaman Kerja dengan Kualitas Audit. Auditor yang kurang berpengalaman akan lebih banyak melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaannya dibandingkan dengan auditor yang sudah berpengalaman. Auditor yang berpengalaman dinilai kinerjanya lebih optimal serta lebih mampu mendeteksi, memahami bahkan mencari penyebab dari munculnya kecurangan-kecurangan daripada auditor yang tidak berpengalaman, sehingga Kualitas Audit yang dihasilkan pun akan lebih baik daripada auditor yang tidak berpengalaman.

Dalam penelitian Lastanti (2012) menyatakan bahwa seseorang yang kompeten adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan luas

yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Pengetahuan seorang auditor juga dapat mempengaruhi Kualitas Audit yang dihasilkan. Perbedaan pengetahuan atau keterampilan yang dikuasai seorang auditor akan berpengaruh pada cara auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, untuk mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor juga didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi.

Sikap mental independen juga sama pentingnya dengan Kompetensi yang harus dimiliki auditor. Independensi menjadi sikap yang harus dijunjung tinggi, agar dapat menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Sikap mental inilah yang mampu menjaga auditor agar tidak terpengaruh terhadap segala sesuatu yang dapat mempengaruhi Kualitas Audit yang dihasilkan. Terkait dengan Independensi, auditor internal pemerintah memiliki posisi yang rentan terhadap tekanan politik. Kadang intervensi politik bisa terjadi jika temuan terkait sampai dengan ranah politik. Auditor internal akan berada di bawah pengaruh pihak penentu kebijakan.

Pengalaman Kerja, Kompetensi dan Independensi yang dimiliki auditor sangat berkaitan dengan hasil audit. Auditor mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi standar kinerja mereka terhadap organisasi di mana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri. Menurut Sukriah, dkk (2009) menyatakan bahwa masalah sulit yang dihadapi oleh seorang auditor untuk meningkatkan Kualitas Audit adalah bagaimana meningkatkan sikap dan perilaku aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilakukan berjalan dengan wajar, efektif, dan efisien. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa etika juga memberikan pengaruh yang besar juga terhadap peningkatan Kualitas Audit.

Hal ini juga dapat dilihat dari kantor Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, yang mana kualitas hasil audit sangat dipengaruhi oleh pengalaman kerja yang dimiliki oleh auditor, keahlian seorang auditor dan independensi seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Dipilihnya Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) kualitas hasil audit internal di Inspektorat Kabupaten/ Kota di Bali masih jauh dari standar yang ada. Hal ini dapat dilihat bahwa hasil auditor masih belum sesuai dengan SPAP. (2) Kualitas SDM yang ada di Inspektorat Kabupaten/ Kota di Bali masih kurang memadai dalam melakukan proses audit, sehingga banyak pegawai yang direkrut dengan kriteria honorer. Tentunya ini akan kurang memberikan motivasi bagi seorang auditor dalam memaksimalkan kinerjanya ditambah kompetensi yang dimiliki kurang memadai sebagai seorang auditor profesional. (3) Independensi yang dimiliki oleh para auditor di Inspektorat Kabupaten/ Kota di Bali masih dibayangi oleh kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok tertentu. Tentunya ini menjadi penghalang kinerja auditor yang harus bebas dari kepentingan tertentu dan harus independen. Selain itu, adapun hasil penilaian BPS Provinsi Bali, terkait hasil kualitas audit di Inspektorat Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Bali seperti pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Hasil Penilaian Kinerja Inspektorat di Bali Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Pencapaian Kinerja Audit	Keterangan
1	Kota Denpasar	7,88%	Sedang
2	Kabupaten Badung	8,10%	Baik
3	Kabupaten Gianyar	7,00%	Sedang
4	Kabupaten Klungkung	6,78%	Sedang

5	Kabupaten Bangli	6,98%	Sedang
6	Kabupaten Karangasem	7,05%	Sedang
7	Kabupaten Buleleng	6,50%	Sedang
8	Kabupaten Tabanan	6,76%	Sedang
9	Kabupaten Jembrana	6,41%	Sedang

Sumber: Badan Pusat Statistik Perwakilan Provinsi Bali, 2016

Berdasarkan tabel penilaian kinerja inspektorat tersebut, Kabupaten/ Kota yang ada di Bali masih banyak berada pada kategori sedang (6%-8%). Hanya Kabupaten Badung saja yang baru mencapai kinerja inspektorat dalam kategori baik (8,10%). Ini tentunya mengindikasikan masih perlu dilakukan pembenahan baik dari segi SDM maupun faktor lain demi meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten/ Kota yang ada di Bali.

Selain itu, pada kenyataannya Kualitas Audit Internal masih menjadi sorotan, karena masih banyak ditemukannya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Bali tahun 2016 ditemukan beberapa temuan. Temuan tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya temuan BPK tersebut, berarti Kualitas Audit aparat Inspektorat Kabupaten/Kota di Bali masih relatif rendah (Lindawati, 2013). Hal ini juga terlihat pada kabupaten yang ada di Bali seperti Karangasem, Klungkung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Kota Denpasar, Bangli dan Gianyar, serta juga menunjukkan kualitas hasil audit yang belum maksimal, karena independensi auditor pada kabupaten tersebut sering disalahgunakan sebagai wewenang yang tidak merdeka dari gangguan penguasa atau pihak tertentu (Sari, 2015).

Ada dua hal yang menyebabkan Kompetensi aparat Inspektorat Kabupaten/ Kota di Bali kurang optimal. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan hanya diadakan berfokus di Denpasar, Provinsi Bali. Ini menjadi salah satu faktor mengapa hanya beberapa aparat Inspektorat Kabupaten/Kota di Bali yang telah menempuh persyaratan untuk menjadi pejabat fungsional auditor. Selain itu, adanya mutasi antar satuan kerja menyebabkan aparat yang berpengalaman tergantikan oleh yang tidak berpengalaman.

Sebagaimana auditor internal pada umumnya, aparat inspektorat selalu dibayangi oleh pengaruh pihak penentu kebijakan. Di samping itu, banyak pegawai inspektorat yang memiliki hubungan kekeluargaan menyebabkan dekatnya hubungan interpersonal, baik hubungan kekerabatan atau relasi kepentingan lainnya. Hal ini juga mempengaruhi Independensi aparat Inspektorat Kabupaten/ Kota di Bali. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh beberapa instansi yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pengawasan di sini dilakukan dengan tujuan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan mencegah terjadinya kesalahan dalam kewenangan maupun penyimpangan pelaksanaan kegiatan. Pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan, yaitu terdiri dari tindakan untuk mencari keterangan berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi, membandingkan

antara hasil yang dicapai dengan standar yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil disertai dengan rekomendasi tentang tindakan perbaikan. Inspektorat kabupaten sebagai salah satu pelaksana pengendalian intern pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dari KKN. Inspektorat kabupaten merupakan badan pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Tugas yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten adalah mengawasi seluruh kegiatan yang diselenggarakan struktur organisasi pemerintah kabupaten yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Setelah melakukan pengawasan aparat pengawas intern wajib untuk membuat laporan hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada gubernur dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Fungsi Inspektorat kabupaten dalam mengaudit adalah melakukan audit internal pada kegiatan atau proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk mengidentifikasi adanya kecurangan praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan pelanggaran lainnya. Setelah ditemukan kecurangan, auditor internal akan memberikan peringatan dan pembinaan terhadap badan tersebut agar dikoreksi lebih lanjut.

Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja, kompetensi seorang auditor dan independensi yang dimiliki terhadap kualitas audit internal di organisasi pemerintahan dengan mengangkat judul penelitian **“PENGARUH PENGALAMAN KERJA, KOMPETENSI, DAN INDEPENDENSI**

TERHADAP KUALITAS AUDIT INTERNAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BALI”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain :

1. Tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas pada sektor publik terhadap terwujudnya *good governace* di Indonesia semakin meningkat.
2. Pengelolaan pemerintahan yang buruk, sehingga menyebabkan krisis ekonomi.
3. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di Negara Indonesia khususnya di dunia pemerintahan yang semakin meningkat.
4. Kinerja dan kualitas bidang pengelolaan keuangan daerah belum maksimal, dikarenakan pengelolaan pemerintahan yang buruk.
5. Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit dari berbagai pihak, menyebabkan sulitnya penetapan Kualitas Audit.
6. Auditor yang kurang berpengalaman akan lebih banyak melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaannya.
7. Perbedaan pengetahuan atau keterampilan yang dikuasai seorang auditor berpengaruh pada cara auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya.
8. Auditor internal pemerintah sangat sulit untuk mempertahankan sikap Independensinya, karena memiliki posisi yang rentan terhadap tekanan politik dan berada di bawah pengaruh pihak penentu kebijakan.

9. Auditor masih sulit untuk meningkatkan sikap dan perilaku pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak berjalan dengan wajar, efektif, dan efisien.
10. Masih banyak ditemukannya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka terdapat pembatasan masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit apabila peneliti melakukan penelitian terhadap semua faktor. Supaya pembatasan masalah mendapatkan hasil yang terfokus dan tidak menghasilkan penafsiran yang menyimpang, maka peneliti membatasi masalah pada tiga faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit yaitu Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Independensi.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kabupaten/ Kota di Bali?
2. Bagaimana pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kabupaten/ Kota di Bali?

3. Bagaimana pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kabupaten/ Kota di Bali?
4. Bagaimana pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Independensi secara bersama-sama terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kabupaten/ Kota di Bali?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diuraikan di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kabupaten/ Kota di Bali.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kabupaten/ Kota di Bali.
3. Untuk mengetahui pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kabupaten/ Kota di Bali.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Independensi secara bersama-sama terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kabupaten/ Kota di Bali.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diuraikan di atas, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat menambah pengetahuan peneliti dalam pengembangan teori terkait dengan pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Independensi terhadap Kualitas Audit terhadap Kualitas audit. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur-literatur maupun penelitian-penelitian di bidang auditing.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Auditor Inspektorat

Diharapkan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya meningkatkannya. Dapat membawa organisasi ke arah yang lebih baik terutama pada Inspektorat Kabupaten/ Kota di Bali.

b) Bagi Pengguna Jasa Audit

Diharapkan dapat menilai apakah auditor internal konsisten dalam menjaga kualitas audit yang diberikan.

c) Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sekaligus untuk memperluas pengetahuan dengan mewujudkannya sebagai referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya.